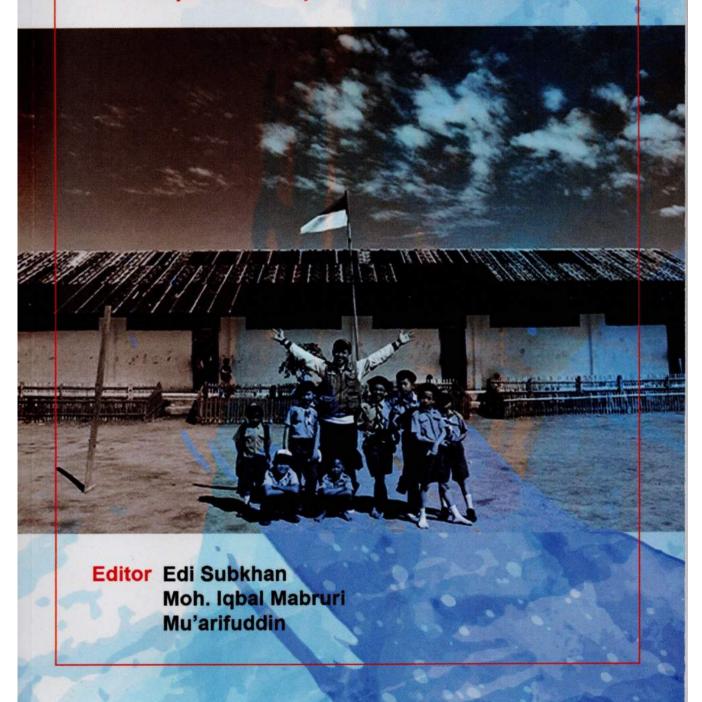


Memikirkan Kembali Arah Pendidikan Indonesia

Kritik, Potensi, dan Rekomendasi



Memikirkan Kembali Arah Pendidikan Indonesia

Kritik, Potensi, dan Rekomendasi

Editor Edi Subkhan Moh. Iqbal Mabruri Mu'arifuddin



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Edi Subkhan, Moh. Igbal Mabruri, dan Mu'arifuddin

Memikirkan Kembali Arah Pendidikan Indonesia: Kritik, Potensi, dan Rekomendasi/ Edi Subkhan, Moh. Iqbal Mabruri, dan Mu'arifuddin.

-Ed. 1-Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

xxiv, 432 hlm., 23 cm

Bibliografi: ada di setiap bab ISBN 978-623-372-311-4

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3454 RAJ

Edi Subkhan

Moh. Igbal Mabruri

Mu'arifuddin

MEMIKIRKAN KEMBALI ARAH PENDIDIKAN INDONESIA

Kritik, Potensi, dan Rekomendasi

Cetakan ke-1, Maret 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Tim Editorial RGP

Setter : Jaenudin

Desain Cover: Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon: (021) 84311162

E-mail: rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Dann, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

DAFTAR ISI

		YEAD	
KATA PE			v
Dekan FIP			vii
KATA PE	NGA		
DAFTAR			xiii
TOPIK 1	MEI	MIKIRKAN KEMBALI ESENSI-ESENSI	
1011111		IDIDIKAN KITA	1
BAB 1	ME	RDEKA BELAJAR: ANTARA ESENSI DAN	
DIID I		NTRADIKSI	
		Subkhan	3
	A.	Pendahuluan	4
	B.	Merdeka Belajar: Filosofi Pendidikan atau	
	Ъ.	Sekadar Jargon?	8
		1. Merdeka Belajar, Tetapi Pro-Neoliberalisasi	11
		2. Merdeka Belajar, Jargon yang	45 42
		Mengaburkan Kepentingan	16
	C.	Penutup	20
	Daf	tar Pustaka	21

BAB 2		ANGKAT MANAJEMEN KUALITAS	
	Abdı	ıl Malik	25
	A.	Pendahuluan	26
	B.	Diskursus Standardisasi Pendidikan	30
		1. Lingkup Standardisasi Pendidikan	33
		2. Tren Standardisasi di Bidang Pendidikan	35
	C.	Problematika Standar Nasional Pendidikan	36
		1. Lingkup dan Komprehensivitas	37
		2. Koherensi Kerangka Pikir	39
		3. Kejelasan dan Keterukuran	42
		4. Efektivitas dan Implikasi Finansial	45
		 Kompatibilitas dengan Pendidikan Vokasional 	47
	D.	Menuju Standar Nasional Pendidikan yang Efektif dan Layak Kelola	49
		SNP Sebagai Perangkat Manajemen Kualitas	51
		2. Struktur dan Komponen	54
	E.	Penutup	55
	Daft	ar Pustaka	56
BAB 3		IDIDIKAN DASAR SEBAGAI IJURU UTAMA	
	Ahm	ad Rizali	61
	A.	Pendahuluan	62
	B.	Atlas, Peta Jalan, Cetak Biru Sistem	
		Pendidikan, dan Rambu-rambu	63
	C.	Usulan Isu Strategis	63
	D.	Prioritas Strategis dan Persoalan Dasar	67
	E.	Penutup	69
	Daft	ar Pustaka	70

TOPIK 2			AL KUALITAS, AKSES, DAN AMAN PENDIDIKAN	71
BAB 4	MEI	NGU.	RAI BENANG KUSUT AKSES IKAN BERKUALITAS	
			ri Sarasvati Ramli dan Karina Adistiana	73
	A.		dahuluan	74
	В.		lidikan Sebagai Hak Dasar Setiap Manusia	74
	C.			76
	C.	1.	es Terhadap Pendidikan Akses Pendidikan di Indonesia Saat Ini	77
		in un		78
	-	2.	Masalah Akses Terhadap Pendidikan	
	D.		lidikan Berkualitas dan Cita-cita Bangsa	84
	E.	7.0 5 7 7 10 5	ara Cita-cita dan Realitas	89
	F.	Berk	tegi Menuju Akses Terhadap Pendidikan tualitas untuk Seluruh Warga Negara	90
			onesia "Al Talal	90
		1.	Menyepakati Makna "Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas"	90
		2.	Menyosialisasikan Gagasan Mengenai "Akses Terhadap Pendidikan yang Berkualitas" kepada Seluruh Pemangku	
			Kepentingan di Bidang Pendidikan	94
		3.	Mendorong Tersedianya Data yang Lengkap Terkait Kondisi Riil Akses	
			Terhadap Pendidikan Berkualitas	95
		4.	Setiap Pemimpin di Bidang Pendidikan untuk Mengambil Keputusan Terkait Akses	
			Terhadap Pendidikan Berdasarkan Data	
			(Kondisi Nyata), Riset, dan Praktik Baik	
			Mengenai Akses Terhadap Pendidikan	
			yang Berkualitas	95
		5.	Mendorong Masyarakat untuk	
			Memberikan Umpan Balik Sebagai Dasar	
			Memperbaiki Kebijakan Terkait "Akses Terhadap Pendidikan yang Berkualitas"	98

	G.	Peni	utup	99
	Daft		ıstaka	99
BAB 5			ITAS KUALITAS PROGRAM LITERASI AH SELAMA PANDEMI COVID-19	
	Sant Sept	i Prat ina Si	iwi Tri Utami, Muh. Iqbal Mabruri, ılistyaningrum, dan Restu Aditia	103
	A.		dahuluan	104
	В.	Has	il dan Pembahasan	108
		1.	Implementasi Program Literasi pada Sekolah Jenjang Menengah di Provinsi Jawa Tengah Selama Pembelajaran Mode Daring dalam Masa Pandemi Covid-19	108
		2.	Kendala yang Dihadapi Tim Literasi Sekolah dalam Implementasi Program Literasi Selama Pembelajaran Mode Daring dalam Masa Pandemi Covid-19	120
		3.	Upaya Tim Literasi Sekolah dalam Meminimalisasi Disparitas Kualitas Implementasi Program Literasi Selama Pembelajaran Mode Daring dalam Masa Pandemi Covid-19	125
	C.	Pen	utup	127
	Dat	ftar P	ustaka	128
BAB 6			CHOOLING BUKAN SEKOLAH H KE RUMAH	
	Afn	i Han	dayani	131
	A.		ndahuluan	132
	B.	Pen	nahaman tentang Homeschooling	134
		1.	Sejarah Homeschooling	134
		2.	Pengertian Homeschooling	136
		3.	Teori-teori Relevan Bagi Homeschooling	136
		4.	Isu-isu Terkini Homeschooling	137

		5. Homeschooling dari Perspektif Sistem	
		Pendidikan Nasional	139
		6. Jenis Homeschooling	141
	C.	Mengenal Homeschooling Sebagai Pendidikan Alternatif	142
		Payung Hukum Homeschooling	142
			1
		2. Faktor Pemicu dan Pendukung Homeschooling	143
		3. Kurikulum Homeschooling	144
		4. Metode Pembelajaran Homeschooling	145
		5. Penilaian Homeschooling	146
	D.	Pendidikan Karakter dalam Homeschooling	148
		1. Implementasi dalam Pendidikan Karakter	148
		2. Nilai-nilai Karakter yang Ditanamkan	150
		3. Faktor Pendukung dan Penghambat	
		Implementasi Pendidikan Karakter	151
	E.	Homeschooling dan Komunitas	152
		1. Komunitas Homeschooling	152
		2. Mencari Komunitas Homeschooling	152
		3. Kunci Keberhasilan Homeschooling	155
	F.	Penutup	156
	Daf	tar Pustaka	157
торік з	ME	NEROKA GAGASAN "PELAJAR	
	PAN	NCASILA"	161
BAB 7		OFIL PELAJAR PANCASILA: BUAH TUJUAN?	
	Bam	nbang Pharmasetiawan	163
	A.	Pendahuluan	164
	B.	Mendesain Masa Depan	165
	C.	Aktualisasi Pancasila dalam Pendidikan	167
	D.	Agama dan Trimatra Pendidikan	170
	E.	Profil Pelajar Pancasila	171

	F.	Penutup	172
		ar Pustaka	173
BAB 8		IAN FILOSOFI PROFIL PELAJAR NCASILA	
	Giri	Harto Wirotomo dan Edwindha	
	Praf	ītra Nugraheni	175
	A.	Pendahuluan	176
	В.	Kajian Ontologi Profil Pelajar Pancasila	178
	C.	Kajian Epistemologi Profil Pelajar Pancasila	184
	D.	Kajian Aksiologi Profil Pelajar Pancasila	185
	E.	Penutup	187
	Daf	tar Pustaka	188
BAB 9		MIKIRKAN ULANG PROFIL PELAJAR DI A MERDEKA BELAJAR	
		awan	191
	A.	Pendahuluan	192
	В.	Merdeka Belajar dan Relevansinya di Era Disrupsi	194
	C.	Telaah Kritis Merdeka Belajar	197
	Ŭ.	Esensi Merdeka Belajar	197
		Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara	198
		3. Merdeka Belajar dalam Pandangan Humanistik	199
		4. Merdeka Belajar dalam Pandangan Self-Regulated Learning Theory	201
	D.	Siswa Ideal di Era Merdeka Belajar	205
	E.	Penutup	211
	Dat	ftar Pustaka	212

TOPIK 4		HTALISASI PENDIDIKAN: PELUANG N TANTANGAN	217
BAB 10	DAI	RI KELAS-KELAS TRADISIONAL KELAS-KELAS DIGITAL	
		nad Farchan	219
	A.	Pendahuluan	220
	В.	Pembahasan	222
		1. Adaptasi Teknologi	222
		2. Inovasi Pembelajaran	224
		3. Aksesibilitas Kelas Digital	227
		4. Peran Pendidik dalam Kelas Digital	229
	C.	Penutup	231
	Daf	tar Pustaka	232
BAB 11	LAY	TENSI OTOMATISASI MANAJEMEN YANAN PENDIDIKAN BERBASIS TIK DI RGURUAN TINGGI	
	Rizo	ı Arifudin, Subhan, dan Yahya Nur Ifriza	235
	A.	Pendahuluan	236
	В.	Proses Bisnis Perguruan Tinggi	237
	C.	Pendukung Otomatisasi Manajemen Layanan Perguruan Tinggi	240
		1. Layanan Mandiri	240
		2. Chatbot	241
		3. Penggunaan Teknologi Cerdas Pendukung Otomatisasi Layanan	242
	D.	Proses Integrasi Sistem Pendukung Otomatisasi Manajemen Layanan Perguruan	
		Tinggi	245
	E.	Monitoring Performa Otomatisasi Proses	
		Bisnis Perguruan Tinggi	246
		1. Gauge Meter	248
		2. Grafik Garis	249
		3. Diagram Batang	249

	F.	Penutup	250
	Daft	ar Pustaka	250
BAB 12	E-LE KEJ Hadi	NGGAGAS KERANGKA KERJA EARNING UNTUK SEKOLAH MENENGAH URUAN romi, Basyirun, Heri Yudiono, Adhetya Kurniawan,	252
		Imam Sukoco	253
	A.	Pendahuluan	254
	В.	Pembahasan	255
		1. Kerangka Kerja E-Learning di SMK	255
		 Pengelolaan Kerangka Kerja E-Learning di SMK 	256
		3. Kualitas Online Learning	258
		4. Jaminan Kualitas Online Learning di Sekolah Menengah Kejuruan	262
	C.	Penutup	263
	Daft	ar Pustaka	264
ТОРІК 5	KUI	RIKULUM DAN PEMBELAJARAN	269
BAB 13	SEK	RIKULUM MERDEKA: IDE UNTUK COLAH-SEKOLAH INDONESIA DI DUNIA CA-PANDEMI	
	Ahm	ad Junaidi	271
	A.	Pendahuluan	272
	B.	Kurikulum Sentralistik dan Tantangannya	274
	C.	Kondisi Masyarakat Indonesia	276
	D.	Kurikulum Mandiri Pasca-Pandemi	277
	E.	Tantangan Terhadap Kurikulum Mandiri	278
		1. Tantangan dan Jawaban 1: Kompetensi	
		Guru	279
		2. Tantangan 2: Standardisasi Kualitas	283
	D.	Apa yang Harus Dilakukan?	285
		1. Kontekstualitas dan Potensi Belajar Siswa	286

		 Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di LPTK 	287
		3. Pendidikan dan Pendampingan Guru	287
	E.	Penutup	289
	Daf	tar Pustaka	290
BAB 14		NGANTISIPASI <i>LEARNING LOSS</i> DI MASA NDEMI COVID-19	
	Anii	ndhyta Putri Pradipta	297
	A.	Pendahuluan	298
	В.	Evaluasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 dan Kemungkinan Terjadinya	300
	_	Learning Loss	300
	C.	Faktor Penyebab Terjadinya <i>Learning Loss</i> di Masa Pandemi Covid-19	301
	D.	Dampak Learning Loss di Masa Pandemi Covid-19	302
	E.	Kebijakan-kebijakan yang Perlu Diambil dalam Mengantisipasi Terjadinya <i>Learning Loss</i> Secara Efektif dan Efisien	303
		Siklus Pembelajaran	306
		Prinsip Pembelajaran	306
		3. Prinsip Asesmen	307
	F.	Penutup	311
		tar Pustaka	313
BAB 15	KU	RIKULUM KESEHATAN MENTAL UNTUK NDIDIKAN INDONESIA	313
		Nuzulia	315
	Α.	Latar Belakang	316
	В.	Kurikulum Kesehatan Mental dan Dampaknya Terhadap Penurunan Gangguan Mental pada	
		Siswa	318
	C.	Theoretical Framework: Kurikulum Kesehatan Mental di Indonesia	322

	D. Rancangan Kurikulum Kesehatan Mental untuk Siswa Indonesia	324
	E. Penutup	
	Daftar Pustaka	325 329
BAB 16	IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN PENDEKATAN <i>LINK-</i> <i>AND-MATCH</i> PADA PENDIDIKAN VOKASI	
	Tri Suminar, Mintarsih Arbarini, Agnes Nanda Saputri, Khaled Maulana Ihya Arief Rakhman	225
	Hakim, dan Reny Arumsari A. Pendahuluan	337
	B. Hakikat Pendidikan Vokasi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	338
	C. Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Pendidikan Vokasi dengan Pendekatan <i>Link</i>	
	and Match D. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendekatan Link and Match pada Pendidikan Vokasi	346 349
	E. Penutup	354
	Daftar Pustaka	355
BAB 17	REVITALISASI PEMBELAJARAN IPS TEMATIK-INTEGRATIF DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
	Arif Purnomo dan Ferani Mulianingsih	359
	A. Pendahuluan	360
	B. Tradisi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keterampilan Abad ke-21	361
	C. Praksis Pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama	363
	D. Revitalisasi Pembelajaran IPS	365
	1. Guru	366
	2. Kurikulum dan Bahan Ajar	370

	E.	Penutup	371
	Daft	ar Pustaka	372
торік 6	GU	RU	375
BAB 18	PER	ANSFORMASI PERAN GURU UNTUK RUBAHAN CARA BELAJAR YANG DIKAL DI MASA DEPAN	
	Purr	aama Sari Pelupessy dan Monica Irayati	377
	A.	Pendahuluan	378
	В.	Melihat Tantangan Zaman dan Arah Pendidikan di Masa Depan	379
		1. Teknologi Memfasilitasi	
		Kebutuhan Belajar	379
		2. Pendekatan Berbasis Manusia	382
		3. Melihat Karier Masa Depan	384
	C.	Proyeksi Perubahan Cara Belajar dan Tren Pendidikan Masa Depan	385
	D.	Mengapa Transformasi Peran Guru Menjadi Penting?	388
	E.	Relevansi Transformasi Peran Guru dan Kompetensi yang Dibutuhkan	392
	F.	Apa yang Perlu Dilakukan Guru untuk Mengantisipasi Transformasi Perannya?	394
	G.	Kesenjangan dalam Pendidikan Saat Ini	397
	H.	Penutup	398
	Daft	ar Pustaka	399
BAB 19		ERASI DIGITAL UNTUK MEMPERKAYA YA MENGAJAR GURU IPS	
	Fera	ni Mulianingsih dan Arif Purnomo	403
	A.	Pendahuluan	404
	В.	Literasi Digital	404
	C.	Gaya Mengajar Guru	407
	D.	Pembelajaran Masa Pandemi	407

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN PENDEKATAN LINK-AND-MATCH PADA PENDIDIKAN VOKASI

Tri Suminar, Mintarsih Arbarini, Agnes Nanda Saputri, Khaled Maulana Ihya Arief Rakhman Hakim, dan Reny Arumsari

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

Email: tri.suminar@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Pendidikan vokasi proses menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan dunia kerja masa depan. Dunia kerja lulusan pendidikan vokasi berhadapan dengan persaingan dan kerja sama, serta penyesuaian diri terhadap perubahan perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan usaha meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Salah satu strateginya adalah mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan link and match. Kolaborasi lembaga pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasi dan kejuruan, terutama dalam memberikan masukan terhadap kompetensi dan standardisasi kemampuan peserta didik lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan. Tujuan penulisan bab ini adalah mengkaji: (1) hakikat pendidikan vokasi yang bermutu dalam pengembangan sumber daya manusia, (2) kurikulum berbasis kompetensi pendekatan link and match, dan (3) implementasi kurikulum berbasis kompetensi pendekatan link and match dalam pembelajaran, upaya meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang berkualitas tinggi, mampu berdaya saing. Metode telaah yang digunakan adalah literatur reviu hasil penelitian terdahulu dan kajian teoretik yang relevan.

Kata Kunci: implementasi kurikulum, kurikulum berbasis kompetensi, *link and match*, pendidikan vokasi.

A. Pendahuluan

Pendidikan vokasi di Indonesia dipersiapkan untuk menghadapi tantangan era perdagangan bebas yang menuntut kualitas sumber daya manusia mampu berdaya saing secara ketat dan tajam. Secara empiris persoalan yang dihadapi adalah mutu sumber daya manusia saat ini masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengindikasikan belum merespons tuntutan perkembangan kebutuhan pasar kerja (Slamet, 2015). Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60% (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah (57,54% atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah dan tinggi mencapai 8,01% (Sri Kurnia Yuliarnis, 1858). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menciptakan kualitas tenaga kerja yang terampil sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja yakni dunia usaha dan industri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Masalah pengangguran yang disebabkan kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ini dapat dianalisis dari aspek manajemen pendidikan, yakni masalah relevansi pendidikan. Kurikulum pendidikan vokasi tidak menyediakan bidang studi tertentu yang memberikan keterampilan spesifik pekerjaan bagi pasar kerja (Disas 2018). Oleh karena itu, upaya manajemen mutu pendidikan vokasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan link and match dinilai sangat ideal dan sangat diandalkan sebagai salah satu alternatif solusi untuk menjembatani kesenjangan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, menciptakan keterkaitan antara pemasok tenaga kerjanya dengan penggunanya (supply driven). Link and match adalah untuk mendekatkan pemasok (supplier) dengan mutu sumber daya manusia, terutama yang berhubungan dengan kualitas ketenagakerjaan (Muslih, 2014).

Kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan *link and mata* mengandung makna bahwa kurikulum yang dilakukan pada pendidikan vokasi saat ini berorientasi untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai sumber daya manusia masa depan yang sesuai atau sepadan dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri (Wonggo, 2017). Rencana dan pengaturan pendidikan vokasi yang terdiri atas standar kompetensi, standar materi, indikator pencapaian, strategi pengajaran, cara penilaian, dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dalam mencapai kompetensi lulusan menganut prinsip berproses menyiapkan dan menghasilkan tamatan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa depan, 3-4 tahun mendatang. Dunia kerja lulusan pendidikan vokasi dan kejuruan adalah dunia ekonomi yaitu dunia yang mengandung fenomena persaingan dan kerja sama, dunia yang cepat mengalami perubahan (Murnomo, et al., 2010).

Link dan match antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri merupakan kebijakan pendidikan nasional yang pernah dicanangkan sejak Orde Baru Kabinet Pembangunan VI dengan Menteri Pendidikan Dr. Ir. Ing. Wardiman Djojonegoro (1993-1998). Kenyataan yang sangat kontradiktif dalam menerapkan link and match, masih terjadi kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang dipersiapkan bagi peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu, justru lulusannya masih banyak yang menganggur. Lulusan dinilai tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja (Jubaedah, 2016). Revitalisasi kebijakan link and match pada masa Kabinet Indonesia Bersatu I dan II (2004-2011), pada peta perencanaan yang dibuat pemerintah, ditargetkan, rasio jumlah siswa SMA: SMK pada tahun 2010 sekitar 50 : 50, dan pada tahun 2015 sekitar 70 : 30 (Sunyoto, 2007). Kebijakan link and match diarahkan untuk menekan angka pengangguran, baik pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan maupun pada tingkat pendidikan vokasi yang dari waktu ke waktu semakin meningkat (Disas, 2018). Namun, sayangnya program dari kebijakan link and match dengan meningkatkan rasio pada jenjang tingkat menengah (SMK) dibandingkan pendidikan sekolah umum, masih terdapat jurang ketidak-link and match-an antara dunia pendidikan vokasi dan kejuruan dengan dunia kerja (Husein, 2019). Realitas ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum pada pendidikan vokasi dengan pendekatan link and match bukanlah hal yang sederhana dan mudah. Implementasi

kurikulum dengan pendekatan *link and match* pada pendidikan vokasi atau kejuruan masih perlu dikembangkan dengan pemikiran yang inovasi yang kreatif.

Pengelola pendidikan vokasi dituntut dapat memaksimalkan dan melakukan penjaminan mutu kompetensi lulusannya. Sehubungan hal ini Ketua Pembina Politeknik yang sekaligus dosen UI, Soemarso mengatakan untuk penerapan kebijakan *link and match* diperlukan adanya hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan vokasi yang menyusun kurikulum dengan pengguna kebutuhan tenaga kerja (Disas, 2018). Namun, realisasinya penyusunan kurikulumnya masih berjalan sendiri-sendiri. Penyelenggara pendidikan merasa mampu melihat kebutuhan industri. Sementara, industri merasa lulusan pendidikan vokasi belum siap kerja. Sebab itu, keterlibatan pihak dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan vokasi menjadi mutlak agar lulusan pendidikan vokasi memenuhi standar kebutuhan. Dengan demikian, revitalisasi pendidikan vokasi perlu melibatkan beberapa pihak dan pada semua sektor.

Kebijakan link and match jika dimaknai sebagai upaya penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja pada masa kini dan masa datang, maka paradigma orientasi pendidikan barubah dari yang semula bersifat supply driven, menjadi demand driven (Muslih, 2014; Slamet, 2015; Wonggo, 2017). Sasaran kebijakan link and match pada pendidikan vokasi menempatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berperan penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi mulai dari menyusun standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, menentukan ruang lingkup materi, menetapkan strategi pembelajaran sampai dengan menetapkan teknik penilaiannya (Ali, et al., 2020). Selain itu, link and match pada pendidikan vokasi diharapkan dunia usaha dan industri terlibat dalam proses pembekalan kompetensi lulusan dalam bentuk program magang bagi mahasiswa dan program magang bagi dosen pada lembaga dunia usaha dan industri, program dosen tamu dari dunia usaha dan industri (praktisi), dan peran dunia usaha dan industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan kompetensi standar profesional.

Kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan pendidikan vokasi pada masa pemerintahan tahun 2019–2024 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) yang dipimpin oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan

pendekatan *link and match* yang diwujudkan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (Junaidi, *et al.*, 2020). Kebijakan ini sangat bermakna untuk mewujudkan kompetensi lulusan pada masa depan yang bermutu dan unggul dan profesional. Bagaimana bentuk implementasi program kerja sama antara pihak pendidikan vokasi dengan pihak dunia usaha dan industri? Penulisan bab ini bertujuan mengkaji pengelolaan pendidikan vokasi yang bermutu dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi pendekatan *link and match*. Ruang lingkup kajian mencakup: (1) hakikat pendidikan vokasi yang bermutu dalam pengembangan sumber daya manusia, (2) kurikulum berbasis kompetensi pendekatan *link and match*, dan (3) implementasi kurikulum berbasis kompetensi pendekatan *link and match* dalam pembelajaran, upaya meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi. Metode telaah yang digunakan adalah literatur reviu hasil penelitian terdahulu dan kajian teoretik yang relevan.

B. Hakikat Pendidikan Vokasi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan suatu wahana untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan guna menjalani dan mengatasi masalah kehidupan pada masa yang akan datang yang selalu mengalami perubahan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM sebagai bekal memasuki dunia kerja di industri. Pendidikan menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan memperkukuh sikap dan kepribadian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas bekerja. Pendidikan merupakan investasi di bidang SDM (human capital). Proses pendidikan membutuhkan waktu panjang dengan biaya yang besar, hasil investasinya adalah berupa peningkatan kemampuan kerja atau produktivitas tenaga kerja dan berdampak diperolehnya tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi

berorientasi pada kecakapan kerja yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja (Pasal 22 ayat [3]).

Pendidikan vokasi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki banyak bidang dan program keahlian disesuaikan dengan kecakapan hidup dan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan vokasi berpotensi mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengangkat keunggulan lokal sebagai modal daya saing bangsa. Pendidikan vokasi membekali kompetensi lulusan dengan keterampilan teknologi sains dan komunikasi sesuai tuntutan bisnis yang memiliki jati diri bangsa dan keunggulan kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

Pendidikan tinggi vokasi berperan dalam menghasilkan lulusan kompeten dengan kualifikasi yang cocok dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi vokasi mampu secara tepat mengidentifikasi kebutuhan di lingkungannya dan menyiapkan proses pembelajaran yang menjamin lulusannya dapat menjawab tantangan tersebut. Profil lulusan pendidikan tinggi vokasi di universitas/akademi maupun politeknik didorong bukan hanya dapat "bekerja", namun juga sebagai "job creator" yang paham dengan keunggulan daerahnya, yang memiliki kemampuan entrepreneurial, sehingga dapat menjadi "trend setter" dalam menjawab berbagai aspek tantangan bangsa ini (Junaidi, et al., 2020; Nurwardani, et al., 2016). Semakin tinggi jenjang pendidikan vokasi berpeluang menghasilkan produk berteknologi tinggi yang added value-nya besar dan memberikan sumbangan pada kemampuan kompetitif bangsa. Pendidikan tinggi vokasi dalam hal ini sangat dituntut untuk dapat mengubah proporsi sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang berkualitas menjadi mayoritas. Pendidikan vokasi merupakan program pendidikan yang mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Oleh karenanya pendidikan vokasi harus dikelola dengan sungguh-sungguh agar lulusan (output) dan outcome-nya sesuai dengan kompetensi kerja yang diminta oleh dunia kerja (Husein, 2019; Junaidi, et al., 2020).

Secara umum kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dijelaskan oleh Olazaran, et al. (2019) pengertian

kompetensi adalah kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya. Robbins (2007) juga menjelaskan kompetensi adalah "kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Komponen kompetensi mencakup: (1) knowledge, yaitu ilmu yang dimiliki individu dalam bidang pekerjaan atau area tertentu, (2) skill, yatu kemampuan untuk unjuk kerja fisik atau mental, (3) self concept, yaitu sikap individu, nilai-nilai yang dianut serta citra diri, (4) traits yaitu karakteristik fisik dan respons yang konsisten atas situasi atau informasi tertentu, dan (5) motives yaitu pemikiran atau niat dasar konstan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku tertentu.

Skill dan knowledge sering disebut hard competencies, sedangkan self concept, traits dan motives disebut soft competence. Menghadapi era global dengan perubahan sosial yang cepat, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bekerja dalam bidangnya (hard competencies) dan menguasai kemampuan soft competence untuk menghadapi perubahan tersebut. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan kompetensi ialah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi meliputi aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) dalam mengerjakan tugas dalam bidang tertentu.

Karakteristik kompetensi lulusan pendidikan vokasi agar bisa bertahan di era global yang selalu berubah adalah memiliki keterampilan pada bidangnya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki keterampilan generik yang berlaku untuk semua level kualifikasi, yaitu: (1) keterampilanketerampilan dasar, misalnya membaca dan berhitung sesuai dengan level dan tipe kualifikasinya, (2) keterampilan sosial seperti bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi, (3) keterampilan berpikir seperti belajar bagaimana belajar (learning to learn), kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan memecahkan masalah; dan (4) keterampilan personal seperti mandiri dan integritas (Junaidi, et al., 2020; Nurwardani, et al., 2016).

Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 59 dikemukakan bahwa pendidikan vokasi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Mandat dan tanggung jawab hak untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi sampai pada jenjang S-2 terapan dan S-3 terapan bisa dilakukan oleh universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik. Bentuk penyelenggaraan pendidikan vokasi pada pendidikan tinggi terdiri atas program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, merupakan program terminasi sebagai satu program utuh, setiap jenjang diploma akan menghasilkan keahlian atau kompetensi sesuai dengan level pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sedangkan jenjang pendidikan vokasi S-2 terapan dan S-3 terapan merupakan jenjang pendidikan setelah lulus diploma 4 atau sarjana (S-1) terapan.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2019 fokus merevitalisasi pendidikan vokasi. Tujuannya, selain untuk meningkatkan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dunia kerja, pendidikan vokasi ini juga dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan industri yang menjadi motor penggerak ekonomi, seiring dengan tuntutan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing pada abad ke-21 era globalisasi dan era Industri 4.0. Revitalisasi pendidikan vokasi ini didasarkan atas beberapa keunggulan strategis, dijelaskan (Wonggo, 2017) antara lain: (a) pendidikan vokasi sesuai karakteristik Negara Indonesia yang fokus pada tahap adaptasi teknologi impor dengan beberapa perbaikan (skill intensive), sehingga membutuhkan pendidikan yang mempersiapkan keahlian terapan dalam berbagai bidang, yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri, (b) pendidikan vokasi menyiapkan lulusan siap kerja dan mampu berdaya saing melalui bekal keterampilan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan dampak perubahan globalisasi yakni beragamnya pusat kekuatan ekonomi dan aktivitas yang dikendalikan oleh kekuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat cepat, dan (c) pendidikan vokasi memiliki multiguna, yakni bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat, bagi peserta didik untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan, meningkatkan peluang memperoleh penghasilan, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, bagi dunia kerja untuk memperoleh tenaga kerja berkualitas tinggi, meringankan biaya usaha, membantu memajukan dan mengembangkan usaha.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan sangat strategisnya peran pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristik kemajuan Indonesia, mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas kerja sesuai tuntutan persaingan globalisasi. Oleh karenanya pengelolaan pendidikan vokasi harus ditingkatkan kualitasnya. Sistem pendidikan vokasi dikelola menjadi sistem yang terbuka (permeable) dan luwes (flexible), dengan pola pembelajarannya yang berbasis kompetensi, program keahliannya lebih menekankan pada kebutuhan pasar kerja pada dunia usaha dan industri dan orientasi pendidikan vokasi dikembangkan dari yang bersifat supply driven menjadi demand driven. Suatu tantangan bagi pengelola pendidikan vokasi, lulusannya tidak hanya memiliki kompetensi yang unggul di daerah saja, namun juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja nasional maupun internasional (Husein, 2019; Slamet, 2015).

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk mendukung keberhasilan pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, dijelaskan (Murnomo, et al., 2010) bahwa diperlukan keterlibatan dunia industri dalam pendidikan vokasi terutama dalam memberikan masukan terhadap kompetensi dan standardisasi kemampuan peserta didik lulusan pendidikan yokasi dan kejuruan. Keharmonisan antara institusi penyelenggara pendidikan vokasi dengan dunia industri harus dibangun agar dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan untuk menetapkan suatu sertifikasi profesi lulusan pendidikan vokasi yang diakui bersama, termasuk dalam kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan internasional. Bahkan kerja sama tersebut perlu diperluas dengan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Terjalinnya kolaborasi kaki tiga (tripartit) antara penyelenggara pendidikan vokasi, pemerintah daerah dan dunia industri diharapkan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Terwujudnya capaian tujuan pendidikan vokasi akan meringankan beban ekonomi negara, sebaliknya kegagalan suatu pendidikan vokasi dan kejuruan berdampak menambah jumlah pengangguran yang akan memperberat ekonomi negara. Dengan demikian, sistem pendidikan keahlian profesional yang diwujudkan dengan memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan vokasi dengan program penguasaan keahlian diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada industri, dapat mewujudkan harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang siap pakai. Pendidikan tinggi vokasi bermutu seiring dengan peningkatan kualitas SDM sesuai kompetensi pada dunia industri, pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam konteks kerja sama profesional.

C. Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Pendidikan Vokasi dengan Pendekatan *Link and Match*

Pengertian konsep kurikulum dapat dimaknai dari beberapa dimensi. Berdasarkan dimensi substansi, kurikulum dimaknai sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai (Rusman, 2009). Konsep kurikulum tersebut hampir sama dengan konsep kurikulum dari dimensi rencana, yang diartikan sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua pengertian kurikulum tersebut berbeda dengan konsep kurikulum dari dimensi aktivitas, kurikulum diartikan sebagai segala aktivitas dari pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran pada lembaga penyelenggara pendidikan. Pengertian kurikulum yang tertuang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum menunjuk suatu dokumen tertulis berisi rumusan: tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal dan evaluasi.

Pengertian kurikulum dari para ahli dan yang tertuang pada undangundang di atas secara eksplisit terdapat 4 komponen kurikulum, yaitu: tujuan, isi dan bahan pembelajaran, metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran serta evaluasi. Kurikulum yang digunakan pada lingkungan pendidikan tinggi sesuai Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Proses Pendidikan Tinggi diartikan sebagai "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran (CP) lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi". Kurikulum pendidikan vokasi merupakan rencana dan pengaturan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi, standar materi, indikator pencapaian, strategi pengajaran, cara penilaian, dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi pendidikan vokasi.

Kurikulum pendidikan vokasi pada perguruan tinggi juga mencakup 4 (empat) komponen, yakni: (1) capaian pembelajaran menunjuk pada kompetensi yang hendak dikuasai oleh mahasiswa, (2) rencana materi yang hendak disampaikan kepada mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran atau kompetensi, (3) metode menyampaikan kepada mahasiswa agar kompetensi yang dirumuskan dapat dikuasai dengan baik, dan (4) evaluasi untuk mengetahui capaian kompetensi mahasiswa (Junaidi, et al., 2020).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai pembelajar, penilaian, kegiatan belajar-mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Kompetensi dikelompokkan menjadi 4 gugus, yakni: (1) factual knowledge, (2) conceptual knowledge, (3) procedural knowledge, dan (4) metacognitive knowledge (Nurwardani, et al., 2016). Terwujudnya keempat gugus kompetensi tersebut dijembatani dengan pengembangan kepribadian, pengembangan keahlian dan keterampilan, pengembangan keahlian berkarya, pengembangan perilaku berkarya dan pengembangan berkehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan Kepmendiknas No. 045/U/2002. Keunggulan KBK adalah mengedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi paradigma pembelajaran versi 4 (empat) pilar UNESCO, yakni: (1) learning to known, (2) learning to do, (3) learning to live to together, dan (4) learning to be. Metode pembelajaran mengacu pada keterampilan proses dengan melahirkan metode yang kreatif, menyenangkan dan kontekstual sesuai kehidupan riil di masyarakat, sistem penilaian lebih memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik dan afektif (Nurwardani, et al., 2016; Slamet, 2015).

Penerapan KBK diarahkan pada pengembangan isi pembelajaran menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan-pendekatan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memiliki unsur edukatif, dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Tolok ukur kompetensi di Indonesia mengacu pada KKNI, yakni sistem penjenjangan pada bidang profesi. Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh enam parameter utama yaitu: (a) ilmu pengetahuan (science), (b) pengetahuan (knowledge), (c) pengetahuan praktis (know-how), (d) keterampilan (skill), (e) afeksi (affection), dan (f) kompetensi (competency). Keenam parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor Kualifikasi. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan, baik formal, nonformal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas (Junaidi, et al., 2020; Nurwardani, et al., 2016). Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait.

Penyetaraan capaian pembelajaran melalui pelatihan kerja/ pengalaman kerja dengan jenjang KKNI yang dihasilkan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan dari pendidikan vokasi mencakup penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja (keterampilan khusus), sikap dan tata nilai, wewenang dan tanggung jawab (keterampilan umum) disetarakan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, sebagai berikut: (a) lulusan diploma 1, paling rendah setara dengan jenjang 3; (b) lulusan diploma 2, paling rendah setara dengan jenjang 4; dan (c) lulusan diploma 3, paling rendah setara dengan jenjang 5; (d) lulusan diploma 4 atau sarjana terapan, paling rendah setara dengan jenjang 6. Jenjang 4-6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis (Nurwardani, *et al.*, 2016).

Penyelenggaran pendidikan tinggi vokasi berbasis mutu pada Perguruan Tinggi (PT) mutlak dilakukan, apabila pendidikan vokasi ingin menghasilkan *input*, proses, dan *output* maupun *outcome* yang dapat dipertanggungjawabkan (Sulaiman dan Wibowo, 2016). Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pendidikan vokasi, aktivitas pembelajarannya difokuskan pada kegiatan belajar-mengajar yang lebih didominasi kegiatan praktik. Ciri atau kekhasan pendidikan vokasi adalah mengutamakan menerapkan aspek-aspek praktis yang didukung oleh teori yang tepat. Ketepatan komposisi antara praktik dan teori pendukung menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan pada pendidikan tinggi vokasi. Komposisi praktik lebih dominan daripada teori. Kondisi tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan program *link and match*, adanya kerja sama antara pendidikan vokasi dengan industri, sehingga dapat menunjang kompetensi peserta didik agar mampu bersaing di dunia kerja.

D. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendekatan *Link and Match* pada Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi di Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000. Namun, pada kenyataannya standar kompetensi yang diterapkan oleh dunia kerja sebagai pengguna lulusan pendidikan vokasi, selalu berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, lulusan pendidikan vokasi dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi sampai saat ini belum memuaskan hasilnya karena pada saat pelaksanaan pengembangan kurikulum menggunakan asumsi bahwa kompetensi yang direncanakan tidak berubah selama peserta didik mengikuti pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembang kurikulum pada program studi (prodi) pendidikan vokasi untuk dapat bersinergi dengan stakeholder terkait, mewujudkan profil pendidikan vokasi berorientasi pada profesi dan dunia kerja. Capaian pembelajarannya memiliki sikap profesional yang terstandar, pengetahuan bersifat praktis, keterampilan khusus lebih ditekankan

pada kebutuhan dunia kerja, keterampilan umum bertanggung jawab terhadap lingkup kerja.

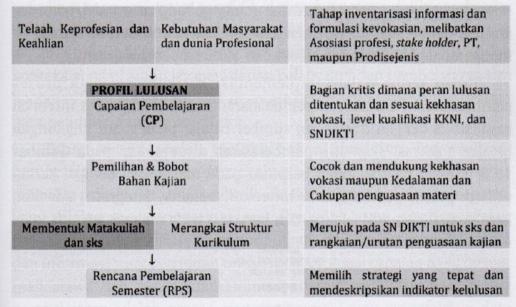
Kurikulum berbasis kompetensi pada pendidikan vokasi dengan pendekatan link and match dengan mengacu pada Kualifikasi Kerja Nasional (National Qualifications Frameworks) merupakan alternatif solusi atas tantangan di atas. Kualifikasi lulusan pendidikan vokasi meliputi keterampilan, pengetahuan, keterampilan komunikasi dan derajat kemandirian yang dikuasai. Penguasaan pengetahuan pada bidang keahliannya ditunjukkan dalam penguasaan konsep teoretis. Kemampuan berkomunikasi meliputi komunikasi verbal dan tertulis. Penguasaan keterampilan ditunjukkan dalam unjuk kerja ketika mengaplikasikannya. Jenjang kualifikasi ditentukan oleh kedalaman, kompleksitas, dan komprehensivitas pengetahuan yang dikuasai. Uraian jenjang pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian yaitu penguasaan hard skills (teori, dan praktik) dan soft skill. Penguasaan hard skill kedalaman dan kompleksitasnya berjenjang. Penguasaan soft skill pada semua jenjang pada dasarnya meliputi keterampilan berkomunikasi sesuai dengan bidang kerjanya yang meliputi komunikasi verbal dan tertulis. Keterampilan berkomunikasi diperlukan pada semua jenjang kualifikasi, sehingga dapat dikatakan merupakan keterampilan yang mutlak diperlukan dan seharusnya diajarkan di sekolah vokasi.

Pada saat ini KKNI sudah menjadi acuan pihak pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, penyelenggara pelatihan formal/nonformal dan pengguna tenaga kerja. Pendidikan vokasi merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan KKNI karena pemberlakuan KKNI dimulai sejak tahun 2012, mengubah kurikulum dan proses pembelajarannya. Pihak lain yang berkaitan dengan akreditasi, sertifikasi, pengakuan kompetensi, pengguna tenaga kerja sudah menyikapi keberadaan KKNI. Pemerintah mengatur seluruh aspek dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, salah satu aspek terpentingnya adalah dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan vokasi yang harus mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Dalam SN-Dikti tersebut dikemukakan bahwa standar pendidikan nasional secara umum meliputi: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan,

(6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran. Merujuk pada Pasal 5 ayat 2 dan Bagian Tiga tentang Standar Isi Pembelajaran, kurikulum pendidikan vokasi harus mampu menciptakan suasana belajar bagi mahasiswa untuk menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Capaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan diskriptor KKNI sesuai dengan jenjang program studinya. CPL terdiri dari ranah sikap dan keterampilan umum yang mengacu pada SN-Dikti, sedangkan ranah keterampilan khusus dan pengetahuan mengacu pada diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 3.

Berikut disajikan skema penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi berwawasan *link and match* mengacu pada standar nasional Dikti dan mengacu pada KKNI.

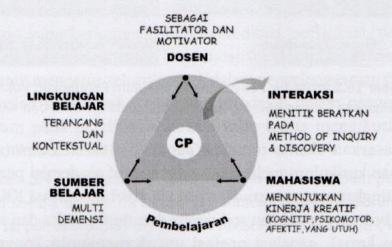


Gambar 16.1 Prosedur Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi Berwawasan *Link and Match* Berorientasi pada SN-Dikti dan KKNI

Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa proses penyusunan kurikulum melibatkan seluruh staf akademisi perguruan tinggi di tingkat program studi, mengacu level kualifikasi KKNI dan SN-Dikti beserta perwakilan *stakeholder* dari dunia usaha dan industri (lapangan kerja), asosiasi profesi untuk menjamin konvergensi konstruksi dari kurikulum program studi dengan ciri dan kekhasan vokasi yang dominan (Junaidi, et al., 2020).

Tahap pertama dalam implementasi kurikulum adalah merancang pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Azman, et al., 2020). Adapun tahapan merancang pembelajaran tersebut dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut: (a) mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah; (b) merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut; (c) merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK; (d) analisis pembelajaran (analisis kemampuan tiap tahapan belajar); (e) menentukan indikator dan kriteria pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar; (f) mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar; (g) memilih dan mengembangkan model/metode/ strategi pembelajaran; (h) mengembangkan materi pembelajaran; (i) mengembangkan dan melakukan dan evaluasi pembelajaran.

Tahap kedua dalam implementasi kurikulum adalah proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ilustrasi skematik pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 16.2. Prinsip pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.



Gambar 16.2 Interaksi Proses Pembelajaran pada Pendidikan Vokasi

Proses pembelajaran mahasiswa wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, oleh sebab itu pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan karakteristik masing-masing mata kuliah. Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih adalah: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Proses pembelajaran pada tiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih metode pembelajaran yang sesuai secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sedangkan bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Pendidik mengembangkan kompetensi dan bakat peserta didik yang berbeda-beda, dilakukan dalam hubungan transaksional pribadi antara pendidik dan peserta didik. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya negosiasi antara pendidik/dosen dan peserta didik/pembelajar dalam hal-hal penting yang menyangkut pembelajarannya (Boahin, et al., 2014). Selaras dengan semua ini konteks yang tumbuh subur adalah konteks pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dan pembelajaran tim kooperatif dan kolaboratif baik di antara peserta didik maupun di antara para pendidik dan administrator.

Tahap ketiga adalah melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran harus memiliki prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian atau asesmen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar mahasiswa dan pencapaian tujuan program pendidikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses menginterpretasi atau menafsirkan data beserta bukti-buktinya dari hasil proses penilaian (Hill, et al., 2020). Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai capaian pembelajarannya. Bentuk penilaian secara formal dapat berupa tugas, tes tulis, tes lisan, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, laporan kegiatan praktik, dan bentuk tes lainnya yang dapat menghasilkan informasi yang menggambarkan pencapaian kinerja belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar

mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa (Olazaran, et al., 2019).

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: pertama, penilaian ranah sikap, dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antarmahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Kedua, penilaian ranah pengetahuan, dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Ketiga, penilaian ranah keterampilan, dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya (Malan, et al., 2016).

E. Penutup

Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis mutu mutlak dilakukan, agar pendidikan vokasi menghasilkan *input*, proses dan *output* maupun *outcome* yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum merupakan komponen *input*, sebagai jantung dari suatu program pendidikan vokasi, sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna dunia usaha dan industri.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk mendukung keberhasilan pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, dilaksanakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan *link and match*, yakni keterlibatan dunia

industri dalam pendidikan vokasi terutama dalam memberikan masukan terhadap kompetensi dan standardisasi kemampuan peserta didik lulusan pendidikan vokasi dan proses pembelajarannya. Pendidikan vokasi sedini mungkin mendekatkan peserta didik dengan dunia kerja dan dunia industri melalui beberapa program yang telah dirancang dalam sistem pembelajaran pada periode tertentu.

Kurikulum berbasis kompetensi pada pendidikan vokasi dengan pendekatan *link and match* mengacu pada Kualifikasi Kerja Nasional (*National Qualifications Frameworks*) dan Standar Nasional Dikti. Implementasinya, aktivitas pembelajaran pada pendidikan vokasi difokuskan pada peserta didik (*student center learning*) yang kegiatan belajar-mengajar lebih didominasi kegiatan praktik dengan suasana belajar yang mampu mendukung bagi peserta didik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL terdiri dari ranah sikap dan ketrampilan umum yang mengacu pada SN-Dikti, sedangkan ranah keterampilan khusus dan pengetahuan mengacu pada diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

Daftar Pustaka

- Ali, M., D. Mardapi, dan T. Koehler. (2020). "Identification Key Factor in Link and Match Between Technical and Vocational Education and Training with Industry Needs in Indonesia". *International Conference on Online and Blended Learning* 2019 (ICOBL 2019), 440(Icobl 2019), pp. 241–245. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200521.053.
- Azman, A., W. Simatupang, A. Karudin, dan O. Dakhi. (2020). "Link and Match Policy in Vocational Education To Address the Problem of Unemployment". *International Journal of Multi Science*, 1(6), pp. 76–85.
- Boahin, P., J. Eggink, dan A. Hofman. (2014). "Competency-Based Training in International Perspective: Comparing the Implementation Processes Towards the Achievement of Employability. *Journal of Curriculum Studies*, 46(6), pp. 839–858. https://doi.org/10.1080/00220272.2013.812680.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

- Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Departemen Pendidikan Nasional.
- . (2002). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.
- Disas, E.P. (2018). "Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan". *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), pp. 231–242. https://doi.org/10.17509/jpp.v18i2.12965.
- Hill, M.A., T.L. Overton, dan C.D. Thompson. (2020). "Evaluating the Impact of Reflecting on Curriculum-Embedded Skill Development: the Experience of Science Undergraduates". *Higher Education Research and Development*, 39(4), pp. 672–688. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1690432.
- Husein, M.T. (2019). "Link and Match Pendidikan Sekolah Kejuruan". Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 15(2), pp. 39–47. https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.2037.
- Jubaedah, Y. (2016). "Model Link and Match dengan Pendekatan Competency Based Training pada Pembelajaran Tata Graha di Sekolah Menengah Kejuruan". *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(1), pp. 19-26. https://doi.org/10.17509/jpp.v15i1.1281.
- Junaidi, A., et al. (2020). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Edisi ke-4. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Proses Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2015). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Malan, L., G. van Dijk, dan D. Fourie. (2016). "The Strategy to Align Road Safety Education to the Further Education and Training Band Curriculum. *Africa Education Review*, 13(2), pp. 132–146. https://doi.org/10.1080/18146627.2016.1224557.

- Murnomo, A., J.T. Elektro, dan F.T. Unnes. (2010). "Empat Langkah Strategis Membangun Kualitas Pendidikan Vokasi dan Kejuruan di Indonesia". Lembaran Ilmu Kependidikan, 39(1), pp. 74–82.
- Muslih. (2014). "Analisis Efektifitas Program Magang untuk Sinkronisasi". Jurnal Manajemen & Bisnis, 14(01), pp. 64-76.
- Nurwardani, P., et al. (2016). Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Olazaran, M., E. Albizu, B. Otero, dan C. Lavía. (2019). "Vocational Education-Industry Linkages: Intensity of Relationships and Firms' Assessment". Studies in Higher Education, 44(12), pp. 2333–2345. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1496411.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Robbins, S.P. (2007). Perilaku Organisasi. Edisi ke-10. Macanan Jaya Cemerlang.
- Rusman (Ed.). (2009). Manajemen Kurikulum. Rajawali Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 (Pertama). Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan.
- Slamet. (2015). "Peran Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Ekonomi". Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2, pp. 189-203. https:// doi.org/10.21831/cp.v0i2.4227.
- Sulaiman, A. dan U.B. Wibowo. (2016). "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada". Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 4(1), 17-32. https://doi.org/10.21831/amp. v4i1.8197.
- Sunyoto. (2007). "Perluasan Sekolah Menengah Kejuruan dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Guru". Lembaran Ilmu Kependidikan, 36(2), pp. 146-156.
- Wonggo, D. (2017). "Tantangan Pendidikan Kejuruan dalam Era Perdagangan Bebas". Seminar Internasional Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia, pp. 489-494. https://

ejournal.undiksha.ac.id/index.php/APTEKINDO/article/view/95/89.

Yuliarnis, Sri Kurnia dan Waskito Waskito. (1858). "Analisis Kebutuhan Studi Implementasi *Link and Match* SMK dengan DU/DI". *Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 4, pp. 294–302.